



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

2025

Provinsi Jawa Tengah

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025. APBN TA 2025 disusun dengan mempertimbangkan faktor perekonomian global dan dilandaskan pada bauran kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, serta memberikan ruang untuk pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya. Hal tersebut diperlukan agar peralihan pemerintahan dapat dilakukan secara lancar pada masa transisi. Kebijakan fiskal yang disusun diharapkan dapat menjawab tantangan, baik struktural maupun siklikal, yang berasal dari global dan domestik.

Pada tahun 2025, dunia diproyeksikan masih akan dihadapkan dengan berlanjutnya ketegangan geopolitik antarnegara yang menimbulkan perang, fragmentasi, proteksionisme, dan disrupsi rantai pasok sehingga menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Selain itu, suku bunga global yang bertahan tinggi, lemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, dan gejolak pasar keuangan turut mempengaruhi risiko global. Indonesia mampu menjaga resiliensi perekonomian, investasi, dan ekspor, lebih baik dibandingkan global. Kita patut bersyukur dan bangga bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih tumbuh sebesar 5,1% di Triwulan ke-3 2024 (y-on-y).

Sebagai tahun pertama pemerintahan baru, tahun 2025 akan menjadi pilar penting untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sebelumnya. Belanja APBN menjadi instrumen untuk merespon tantangan struktural dan mengamankan dari berbagai guncangan (*shock absorber*), dirancang fleksibel dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan. Akselerasi transformasi ekonomi terus ditingkatkan melalui revitalisasi industri termasuk hilirisasi dan ekosistem *electric vehicles (EV) industry*, penguatan sektor jasa termasuk ekonomi kreatif dan digitalisasi, serta penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan *ease of doing business*, dan memperkuat daya saing produk ekspor dan investasi.

Selanjutnya, guna mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju dan keluar dari jebakan *middle income trap* diperlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, APBN harus didorong untuk semakin sehat agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan makro fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan sekaligus penguatan program prioritas dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, APBN TA 2025 disusun sebagai jangkar untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan kebijakan *countercyclical* yang terukur dan terkendali. Indonesia perlu mengakselerasi

pertumbuhan ekonomi hingga 6 bahkan 8% agar mampu keluar dari *middle income trap* dengan cara menciptakan produktivitas untuk meningkatkan kemakmuran. Indonesia harus bisa membangun daya saing dan produktivitas di pasar dunia, serta menekan korupsi.

Pengelolaan fiskal daerah berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) beserta peraturan pelaksanaan turunannya. Sesuai tujuan pembentukannya, UU HKPD diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah, serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian daerah. Adapun pokok arah kebijakan fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Mendorong sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif;
3. Menciptakan kegiatan ekonomi baru (*growth, wellbeing*, dan konvergensi);
4. Perbaikan kualitas belanja APBD;
5. Penguatan *local taxing power*;
6. Pengembangan pembiayaan inovatif; dan
7. Memperbaiki mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) guna menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Sejalan dengan pokok arah kebijakan fiskal dan dalam rangka menghadapi tantangan strategis di atas, maka kebijakan TKD TA 2025 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal dengan memperkuat penggunaan *earmarking* Dana Alokasi Umum (DAU), meningkatkan efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK), dan mengoptimalkan Dana Desa, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
2. Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dimana TKD difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan pariwisata.
3. Memperkuat sinergi kebijakan fiskal dimana kebijakan TKD disinergikan dengan kebijakan fiskal pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih luas, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Memperluas cakupan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga diharapkan kebijakan TKD dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, alokasi TKD mengalami kenaikan dari

tahun ke tahun dan telah mencapai 25,8% dari total APBN TA 2025. Pada TA ditetapkan sebesar Rp919,9 triliun, termasuk di dalamnya Dana Desa sebesar Rp71,0 triliun. Rincian alokasi masing-masing jenis Transfer ke Daerah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025.

Buku ini diterbitkan dalam rangka memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai alokasi masing-masing jenis dana TKD tersebut. Saya berharap, buku ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan APBD TA 2025. Mengingat pentingnya APBN TA 2025 sebagai pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang, maka saya berharap kepada segenap pemerintah daerah untuk segera memanfaatkan dana TKD tersebut sesuai dengan arah kebijakan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lainnya untuk menjaga "Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan". Akhir kata, saya mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam menyukseskan pelaksanaan kebijakan TKD TA 2025. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, 24 Oktober 2024

MENTERI KEUANGAN,



 SRI MULYANI INDRAWATI 

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2025	1
REKAPITULASI ALOKASI SE-PROVINSI JAWA TENGAH	12
1. PROVINSI JAWA TENGAH.....	14
2. KAB. BANJARNEGARA	15
3. KAB. BANYUMAS.....	16
4. KAB. BATANG	17
5. KAB. BLORA	18
6. KAB. BOYOLALI	19
7. KAB. BREBES.....	20
8. KAB. CILACAP	21
9. KAB. DEMAK.....	22
10. KAB. GROBOGAN	23
11. KAB. JEPARA.....	24
12. KAB. KARANGANYAR.....	25
13. KAB. KEBUMEN	26
14. KAB. KENDAL.....	27
15. KAB. KLATEN	28
16. KAB. KUDUS	29
17. KAB. MAGELANG.....	30
18. KAB. PATI.....	31
19. KAB. PEKALONGAN	32
20. KAB. PEMALANG	33
21. KAB. PURBALINGGA	34
22. KAB. PURWOREJO	35
23. KAB. REMBANG.....	36
24. KAB. SEMARANG.....	37
25. KAB. SRAGEN.....	38
26. KAB. SUKOHARJO	39
27. KAB. TEGAL	40
28. KAB. TEMANGGUNG	41
29. KAB. WONOGIRI	42
30. KAB. WONOSOBO	43
31. KOTA MAGELANG	44
32. KOTA PEKALONGAN.....	45

33. KOTA SALATIGA.....	46
34. KOTA SEMARANG	47
35. KOTA SURAKARTA.....	48
36. KOTA TEGAL	49
TIM PENYUSUN BUKU	50

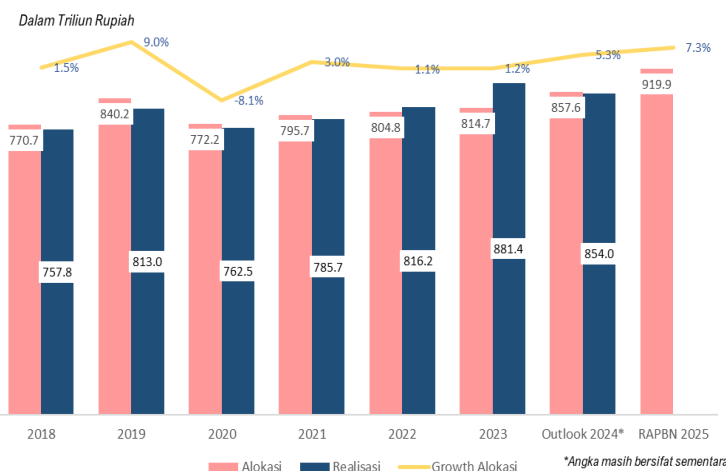


RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TA 2025



TRANSFER KE DAERAH (TKD) TA 2025

Diarahkan untuk Mendorong Belanja Daerah yang Efektif dan Efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah



KEBIJAKAN UMUM TKD 2025

- 1 Sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah.
- 2 Menciptakan kegiatan ekonomi baru (*growth, wellbeing*, dan konvergensi).
- 3 Perbaikan kualitas belanja APBD.
- 4 Penguatan *local taxing power*.
- 5 Pengembangan pembiayaan inovatif.

Peningkatan alokasi TKD antara lain dipengaruhi oleh:

- peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui DBH,
- dukungan pendanaan untuk PPPK,
- penambahan target sasaran guru penerima dana TPG yang telah bersertifikasi, dan
- dukungan penganggaran untuk prioritas nasional

POSTUR TRANSFER KE DAERAH TA 2025

URAIAN	2023	2024	2024	2025
	Realisasi (Audited)	Perpres 76/2023	Outlook	RUU APBN 2025
1. Dana Bagi Hasil	205,7	143,1	143,1	192,3
2. Dana Alokasi Umum	398,0	427,7	427,7	446,6
- DAU tidak ditentukan penggunaannya	288,9	343,5	343,5	358,6
- DAU ditentukan penggunaannya :	109,1	84,2	84,2	88,0
▪ Penggajian Formasi PPPK	25,7	15,7	15,7	17,3
▪ Pendanaan Kelurahan	1,6	1,7	1,7	1,7
▪ Pendanaan Layanan Publik	81,7	66,8	66,8	69,0
3. Dana Alokasi Khusus	181,4	188,1	184,9	185,2
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	50,3	53,8	51,1	36,9
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	128,1	133,8	132,7	146,7
c. Hibah ke Daerah	2,9	1,2	1,1	1,6
4. Dana Otonomi Khusus	17,2	18,3	18,3	17,5
5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1,4	1,4	1,4	1,2
6. Dana Desa	69,9	71,0	70,9	71
7. Insentif Fiskal	7,9	8,0	7,8	6,0
TOTAL TKD	881,5	857,6	854,0	919,9

Penjelasan Pagu Anggaran TKD TA 2025:

DBH naik sebesar Rp 49,2 T karena:

- ✓ Peningkatan proyeksi penerimaan negara
- ✓ Alokasi Kurang Bayar DBH Rp27,8 T.

DAU naik sebesar Rp 18,9 T karena:

- ✓ Dukungan penggajian formasi ASND 2025 dan dukungan penggajian PPPK yang telah diangkat.
- ✓ Diusulkan untuk pergeseran DAU Penggajian PPPK ke DAU Yang tidak ditentukan Penggunaannya

DAK Nonfisik naik sebesar Rp 13,9 T karena:

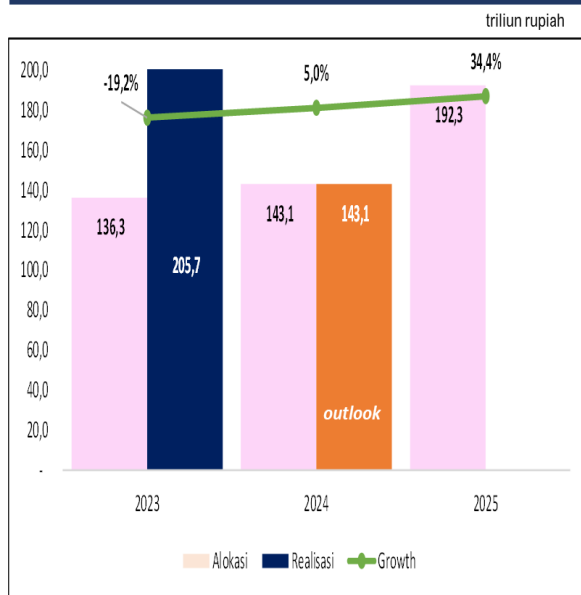
- ✓ Terutama adanya kenaikan sasaran guru bersertifikasi dan perluasan sasaran beberapa jenis DAK Nonfisik.

Beberapa jenis TKD mengalami penurunan karena:

- ✓ Untuk memberi ruang fiskal yang memadai sesuai strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL TA 2025

PERKEMBANGAN DBH TA 2023-2025



□ Pada tahun 2023, dilakukan penyelesaian KB DBH s.d. TA 2022 dan penambahan alokasi DBH reguler, sehingga total realisasi DBH menjadi Rp205,7 Triliun.

KEBIJAKAN DBH TA 2025

1. Alokasi DBH yang berkeadilan dan mendorong pelestarian lingkungan serta perubahan iklim.
2. Penyaluran DBH berdasarkan kinerja.
3. Penggunaan DBH *earmarked* untuk sektor prioritas dan penguatan sinergi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Transparansi dan akuntabilitas DBH.

POSTUR DANA BAGI HASIL TA 2025

(miliar rupiah)

Jenis DBH	2024 APBN	2025 RAPBN	Selisih	
			Rp	%
Pajak	55.773,9	77.302,8	21.528,9	38,6%
PPh	31.626,6	44.933,1	13.306,5	42,1%
PBB	19.166,6	25.970,8	6.804,2	35,5%
CHT	4.980,8	6.399,0	1.418,2	28,5%
SDA	84.326,0	85.921,0	1.595,0	1,9%
Migas	15.316,0	16.250,9	934,8	6,1%
Minerba	65.079,7	66.402,1	1.322,3	2,0%
Kehutanan	1.464,3	1.104,6	-359,6	-24,6%
Panas Bumi	1.475,8	1.426,6	-49,2	-3,3%
Perikanan	990,2	736,8	-253,3	-25,6%
Lainnya	3.000,0	1.249,9	-1.750,1	-58,3%
Perkebunan Sawit	3.000,0	1.249,9	-1.750,1	-58,3%
Kurang Bayar	0,0	27.808,0	27.808,0	
Total	143.099,9	192.281,7	49.181,8	34,4%

Alokasi DBH dalam RAPBN 2025 sebesar Rp192,3 triliun.

- Alokasi DBH Pajak sebesar Rp77,3 triliun, dengan **alokasi terbesar pada DBH PPh** sebesar Rp44,9 triliun.
- Alokasi DBH SDA sebesar Rp85,9 triliun, dengan **alokasi terbesar pada DBH Mineral dan Batubara** sebesar Rp66,4 triliun.
- Alokasi DBH Perkebunan Sawit sebesar Rp1,3 triliun (4% dari perkiraan realisasi penerimaan Pungutan Ekspor dan Bea Keluar tahun 2024).
- Alokasi minimum DBH Perkebunan Sawit per daerah sebesar Rp500 juta.
- Kurang Bayar DBH dialokasikan sebesar Rp27,8 triliun.

KEBIJAKAN PENGGUNAAN DBH EARMARKED TA 2025

DBH DR

- Optimalisasi penggunaan Sisa DBH DR Kab/Kota sesuai ketentuan perundangan
- Perluasan penggunaan kegiatan strategis lainnya antara lain :
 - ✓ Penguatan Integrated Area Development (IAD)
 - ✓ Pengelolaan kebersihan untuk pelestarian hutan
 - ✓ Pengelolaan jalan sekitar Kawasan
 - ✓ Dukungan pencapaian FOLU Net Sink 2030,
 - ✓ Bantuan jaminan sosial bagi pekerja sektor kehutanan kategori rentan,
 - ✓ Pengelolaan daerah aliran sungai.



DBH CHT

- Digunakan untuk bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum.
- Penerima manfaat termasuk:
 - petani tembakau dan buruh tani tembakau.
 - petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
- Fleksibilitas penggunaan
 - Opsi pengalihan anggaran.
 - Penambahan menu kegiatan.

DBH Sawit

- Fokus pada infrastruktur jalan (minimal 80% dari alokasi).
- Mendorong pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan:
 - Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan.
 - Sertifikasi ISPO pekebun.
 - Rehab hutan dan lahan.
- Terdapat nilai alokasi minimum per daerah.

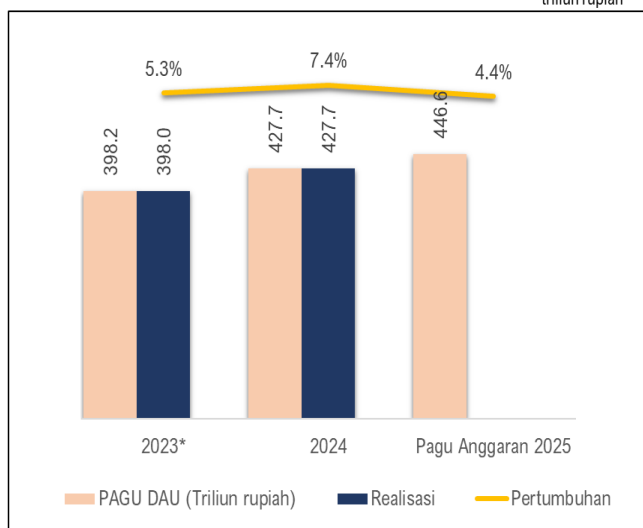


PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAU TA 2025

Pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi dan ekualisasi kualitas layanan dasar daerah

PERKEMBANGAN DAU TA 2023-2025

triliun rupiah



*TA. 2023 termasuk Tambahan DAU untuk THR/G13 Guru ASND sebesar Rp2.2 T
 **(Realisasi 2024 = Outlook 2024)

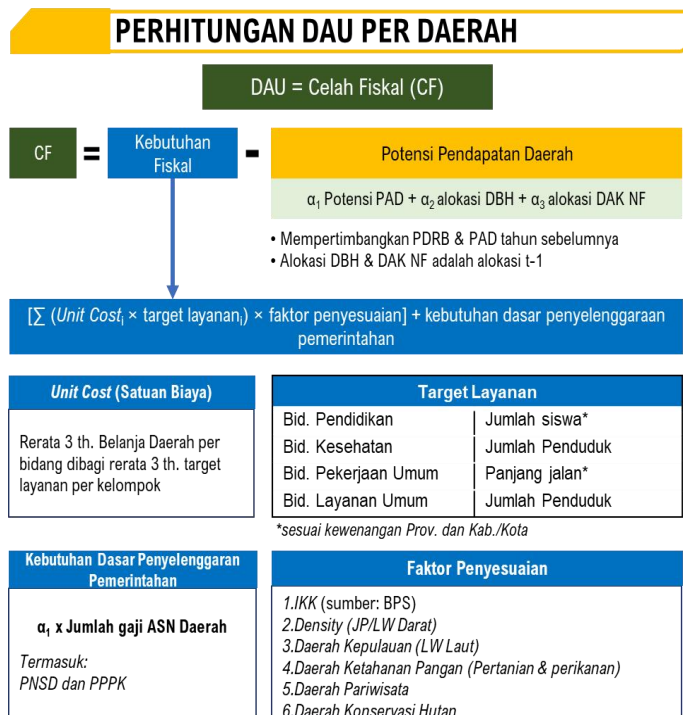
- Pagu DAU tahun 2025 tumbuh sebesar 4,4% dari tahun 2024.

KEBIJAKAN DAU TA 2025

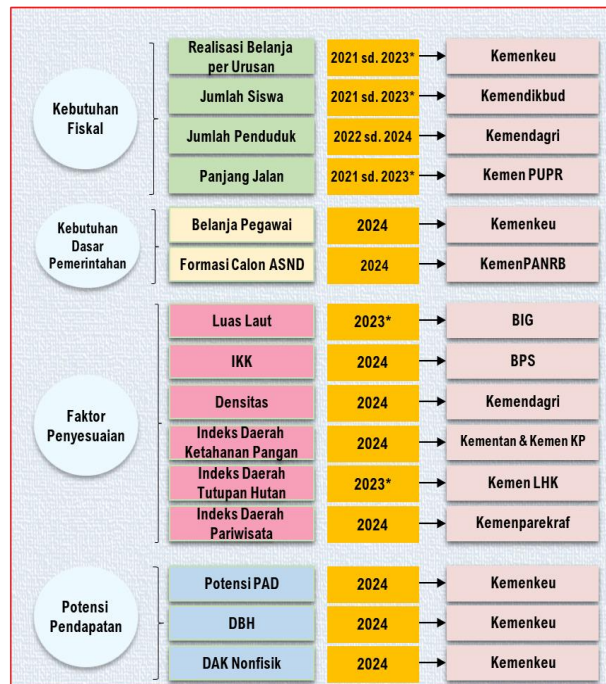
1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU diantaranya kebijakan **holdharmless** sampai 2027.
2. Memperkuat penggunaan **earmarking** DAU.
3. Menjaga tingkat **pemerataan keuangan daerah**.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola **earmarking** DAU.
5. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU berbasis **kinerja**.

DATA DASAR & FORMULA DAU TA 2025

Kebijakan formula dan data dasar perhitungan sama dengan tahun sebelumnya



DATA DASAR DAU



PAGU & PERKIRAAN PEMBAGIAN JENIS DAU TA 2025

(miliar rupiah)

NO	DAU	ALOKASI TA. 2024	ALOKASI TA. 2025		
			RUU APBN	Usulan Kesepakatan Panja TKD	SELISIH Usulan Kesepakatan Panja TKD dengan RUU APBN
1	DAU Blockgrant	343.527,6	358.617,9	360.515,9	1.898,1
2	DAU Earmarked	84.171,7	88.015,9	86.117,8	(1.898,1)
	DAU PPPK	15.676,7	17.253,2	15.355,14	(1.898,1)
	DAU Kelurahan	1.699,6	1.699,6	1.699,6	-
	DAU Pelayanan Dasar	66.795,4	69.063,1	69.063,1	-
	Total	427.699,3	446.633,8	446.633,8	0,0

- terdapat pergeseran Jumlah DAU Penggajian PPPK ke DAU Yang tidak ditentukan Penggunaanya



Penambahan alokasi DAU diarahkan untuk dukungan kebijakan penggajian formasi ASD yang akan diangkat tahun 2025 melalui DAU Earmarked Penggajian PPPK 2025, dan dukungan penggajian PPPK eksisting dalam DAU Blockgrant



Penurunan DAU Earmarked dukungan bidang Pendidikan dipengaruhi oleh peningkatan capaian SPM bidang Pendidikan secara nasional.



Kenaikan DAU Earmarked dukungan bidang Kesehatan sebagai tambahan pendanaan untuk mendukung penurunan prevalensi stunting.



Kenaikan DAU Earmarked dukungan bidang Pekerjaan Umum untuk mendukung anggaran infrastruktur sesuai UU HKPD.



Komposisi DAU Earmark tahun 2025 sebesar 19,3% dari total DAU, lebih rendah jika dibandingkan komposisi DAU Earmark tahun 2024 yang sebesar 19,7% dari total DAU

PAGU & PERKIRAAN PEMBAGIAN JENIS DAU TA 2025

URAIAN	APBN 2024	RAPBN 2025
THEIL (<i>Weighted</i>) Tanpa DAU	0,21344	0,22857
THEIL (<i>Weighted</i>) Dengan DAU	0,14817	0,14257
Penurunan	- 30,6%	- 37,6%

HASIL PENGHITUNGAN ALOKASI DAU TA. 2025:

- Formula penghitungan alokasi dan data dasar DAU TA. 2025 melanjutkan perhitungan DAU TA. 2024 sesuai formula dalam UU 1/2022;
- Dalam alokasi DAU TA. 2025 telah mempertimbangkan **Kebutuhan Daerah terkait pembayaran gaji dan tunjangan melekat PPPK yang diangkat tahun 2024.**
- Hasil perhitungan alokasi DAU TA. 2025 berhasil menurunkan **indeks Theil sebesar – 37,6 %** dari tanpa DAU sebesar 0,22857 menjadi 0,14257 dengan DAU.
- Sebagian alokasi DAU per daerah akan ditentukan penggunaannya, antara lain **untuk penggajian PPPK, pendanaan Kelurahan, dan peningkatan layanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.**

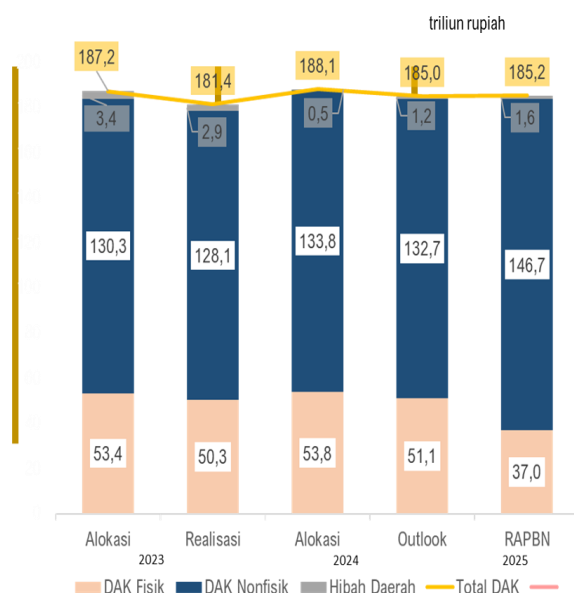
Kebijakan perhitungan alokasi

Penyesuaian alokasi DAU setiap Daerah

- Seluruh Daerah mendapatkan kenaikan alokasi minimal sebesar 2,5% dari alokasi tahun 2024 dan maksimal kenaikan 10% dari alokasi tahun 2024
- Dari penyesuaian tersebut diperoleh hasil:
 - Seluruh Daerah Provinsi mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan sebesar 4.04 %
 - Seluruh Daerah Kabupaten/Kota mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan sebesar 4.05 %

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAK TA 2025

PERKEMBANGAN DAK TA 2023-2025



- Pagu DAK tahun 2025 turun terutama karena pembangunan/rehabilitasi sekolah/kelas di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat agar seluruh siswa/guru di Indonesia dapat menikmati standar kualitas pendidikan yang sama

KEBIJAKAN DAK TA 2025

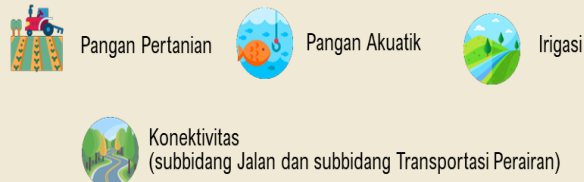
- DAK Fisik:** penyediaan **sarana-prasarana fisik layanan dasar** antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar.
- DAK Nonfisik:** **pendanaan operasional layanan publik terutama** bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pertanian, Sentra Industri dan Koperasi UMK.
- Hibah ke Daerah:** mendukung **transportasi perkotaan**, produksi pertanian di dataran tinggi/*upland*, pelestarian lingkungan hidup, serta pemulihan infrastruktur pasca bencana.
- Matching program** dan **sinergi pendanaan.**
- Meningkatkan kualitas pengelolaan DAK.**

DUKUNGAN, TEMA, & BIDANG DAK FISIK TA 2025

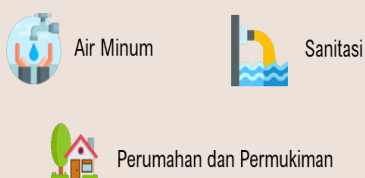
DAK Fisik Layanan Dasar



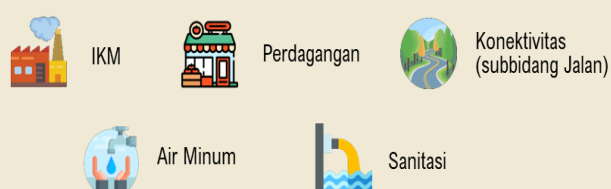
Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)



Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu

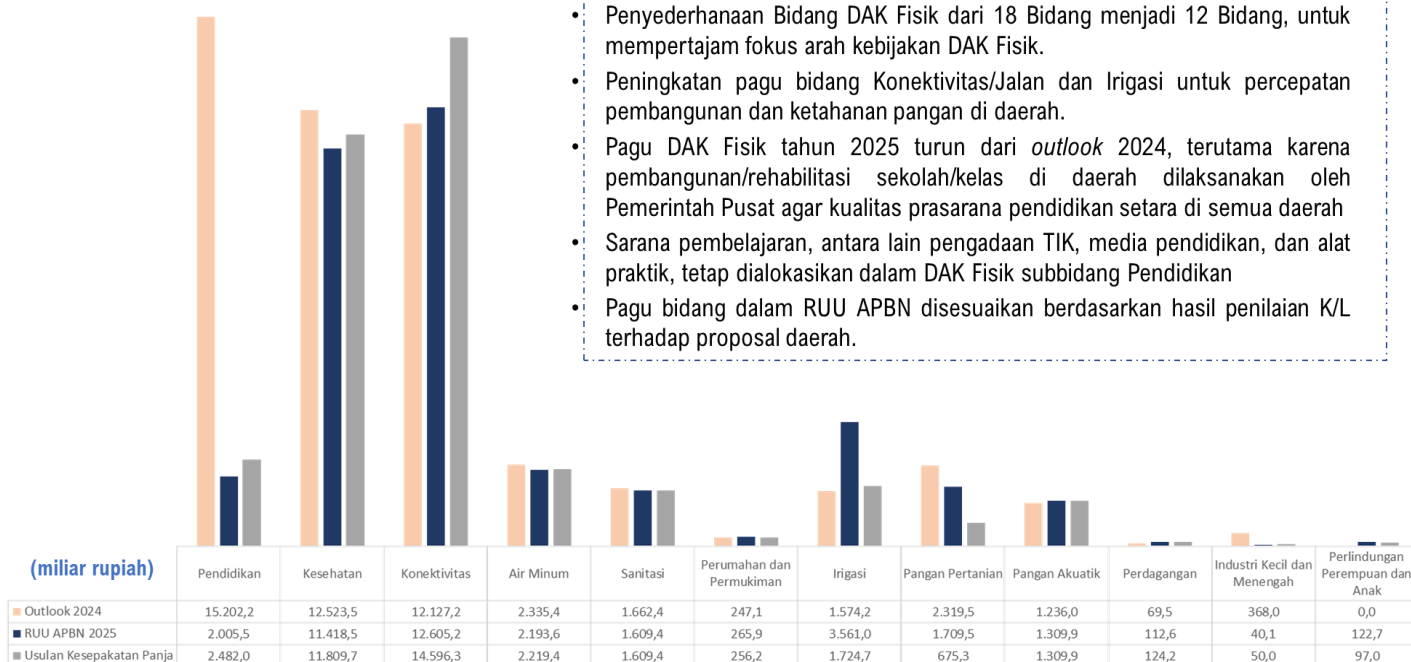


Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri



POSTUR DAK FISIK TA 2025

- Penyederhanaan Bidang DAK Fisik dari 18 Bidang menjadi 12 Bidang, untuk mempertajam fokus arah kebijakan DAK Fisik.
- Peningkatan pagu bidang Konektivitas/Jalan dan Irigasi untuk percepatan pembangunan dan ketahanan pangan di daerah.
- Pagu DAK Fisik tahun 2025 turun dari *outlook* 2024, terutama karena pembangunan/rehabilitasi sekolah/kelas di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat agar kualitas prasarana pendidikan setara di semua daerah
- Sarana pembelajaran, antara lain pengadaan TIK, media pendidikan, dan alat praktik, tetap dialokasikan dalam DAK Fisik subbidang Pendidikan
- Pagu bidang dalam RUU APBN disesuaikan berdasarkan hasil penilaian K/L terhadap proposal daerah.



POSTUR DAK FISIK TA 2025

(Miliar Rupiah)

No	Bidang	Outlook 2024	APBN 2025		Selisih
			RUU	2025	
				Usulan/Kesepakatan Panja TKD	
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Pendidikan	15.202,2	2.005,5	2.482,0	476,5
2	Kesehatan	12.523,5	11.418,5	11.809,7	391,2
3	Konektivitas (Jalan+Transportasi Perairan)	12.127,2	12.605,2	14.596,3	
	- Sub Bidang Jalan	11.777,6	12.205,2	14.258,7	2.053,4
	- Sub Bidang Transportasi Perairan	349,6	399,9	337,6	-62,3
4	Air Minum	2.335,4	2.193,6	2.219,4	25,8
5	Sanitasi	1.662,4	1.609,4	1.609,4	-
6	Irigasi	1.574,2	3.561,0	1.724,7	-1.836,3
7	Perlindungan Perempuan dan Anak	-	122,7	97,0	-25,7
8	Perumahan dan Permukiman	247,1	265,9	256,2	-9,7
9	Pangan Pertanian	2.319,5	1.709,5	675,3	-1.034,2
10	Kelautan dan Perikanan/Pangan Akuatik	1.236,0	1.309,9	1.309,9	-
11	Perdagangan	69,5	112,6	124,2	11,6
12	Industri Kecil dan Menengah	368,0	40,1	50,0	9,9
	Lainnya	1.477,3	-	-	-
TOTAL DAK FISIK		51.142,5	36.953,9	36.953,9	-

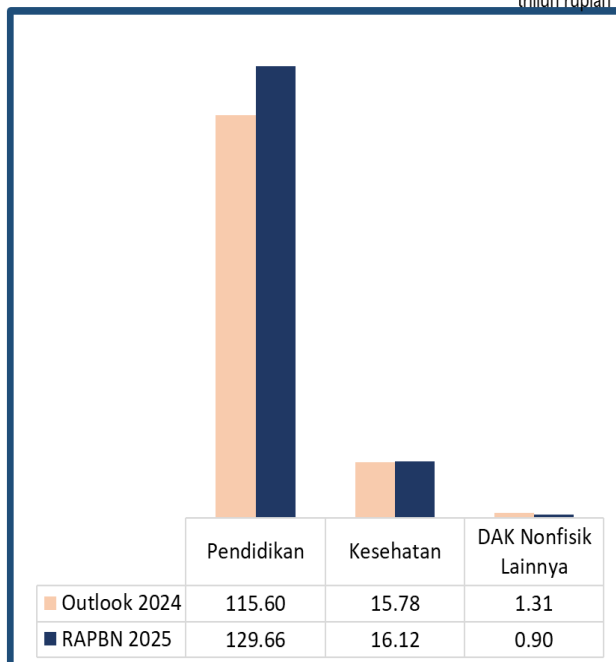
Berdasarkan penilaian atas usulan daerah dilakukan penyesuaian pagu bidang/sub bidang sebagai berikut:

- Pagu bidang irigasi, perumahan permukiman, perlindungan perempuan dan anak, serta pangan pertanian diturunkan sesuai hasil penilaian.
- Sisa pagu hasil penilaian dialihkan sesuai dengan prioritas pembangunan terutama ke bidang Pendidikan (Rp476 M), Kesehatan (Rp391 M), dan Jalan (Rp2,1 T)

POSTUR DAK NONFISIK TA 2025

PERKEMBANGAN DAK NON FISIK TA 2024-2025

triliun rupiah



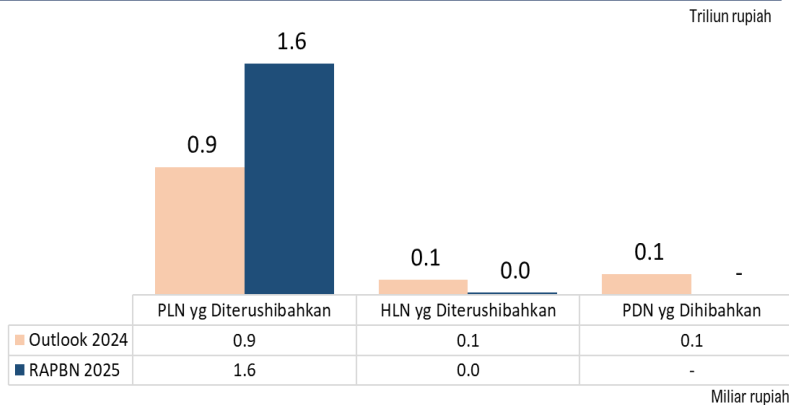
Simplifikasi Jenis dari sebelumnya 16 menjadi 14 jenis, dengan penambahan Pagu DAK Nonfisik karena:

- kenaikan jumlah guru bersertifikat, dan
- kenaikan sasaran terutama BOSP, PK2UMK, dan Pertanian.

No.	Rincian DAK NonFisik	Miliar rupiah	
		Outlook APBN 2024	RAPBN 2025
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.865,6	53.491,7
2	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	4.009,1	4.038,7
3	BOP Pendidikan Kesenjangan	1.618,8	1.741,2
4	Tunjangan Profesi Guru ASND	52.805,5	66.921,6
5	Tambahan Penghasilan Guru ASND	1.219,4	738,2
6	Tunjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus	1.910,7	2.404,5
7	BOP Museum dan Taman Budaya	170,0	170,0
8	Dana BPP Perpustakaan Daerah	-	150,0
9	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	12.541,8	12.878,7
10	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.239,3	3.239,3
11	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	250,0	163,7
12	Dana Pelayanan Kepariwisata	133,3	0,0
13	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	62,7	0,0
14	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	129,9	132,0
15	Dana Fasilitas Penanaman Modal	247,4	0,0
16	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	295,7	516,4
	- Subjenis Pangan		88,4
	- Subjenis Pertanian		211,7
	- Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian		216,3
17	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	194,9	92,0
TOTAL		132.694,1	146.677,9

POSTUR HIBAH DAERAH TA 2025

PERKEMBANGAN HIBAH DAERAH TA 2024-2025



- Pagu Hibah kepada Daerah TA 2025 dialokasikan untuk 3 jenis Hibah kepada Daerah (Hibah MRT, Hibah UPLAND, dan Hibah BioCF ISFL).
- Kenaikan** pagu Hibah kepada Daerah TA 2025 karena adanya peningkatan alokasi hibah untuk program MRT.

Target Output 2025, antara lain:



PERHUBUNGAN

- Lanjutan pembangunan jalur MRT Koridor Utara-Selatan Fase 2A sepanjang ± 5,8 km.
- Pembangunan jalur MRT Jakarta koridor Timur Barat Fase 1 Tahap 1 sepanjang ± 1,77 km.



PERTANIAN

- Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 102 km, terasering lahan seluas 15 ha, bantuan saprodi untuk 3.357 ha, dan pengadaan alsintan sebanyak 2.045 unit



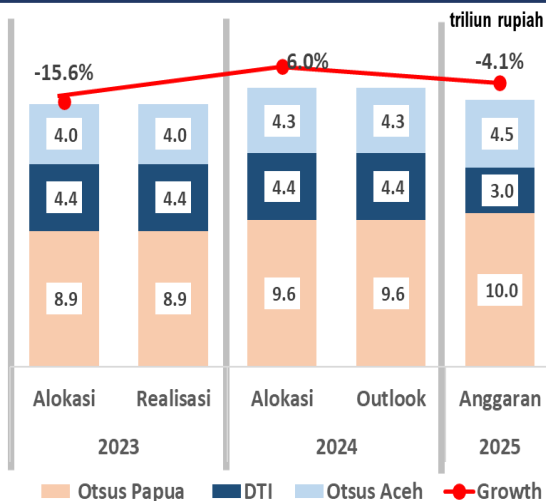
LINGKUNGAN HIDUP

- Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan sebesar 3 juta ton Co2eq; dan
- Pengelolaan area hutan dan lahan secara berkelanjutan pada 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Jenis Hibah kepada Daerah	Outlook 2024	RAPBN 2025 Nota Keuangan	Program/ Kegiatan
A. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	881,9	1.594,9	Pertanian, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup
B. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	102,9	14,1	
C. Penerimaan Dalam Negeri yang Diberikan	142,7	0	
Total	1.127,5	1.609,0	

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA OTSUS & DTI TA 2025

PERKEMBANGAN OTONOMI KHUSUS TA 2023-2025



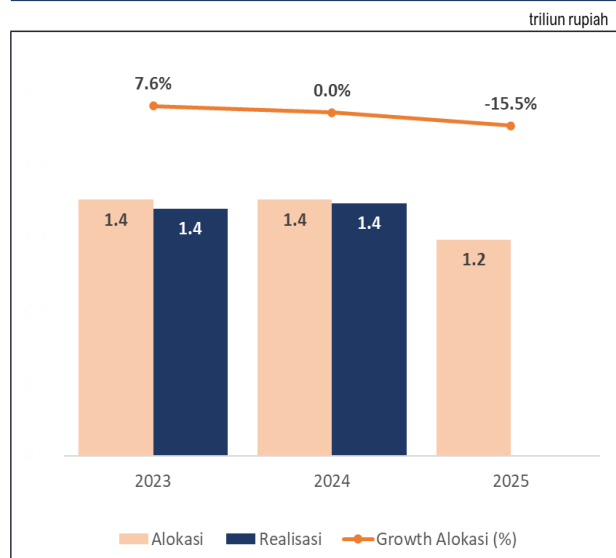
- Pagu Dana Otsus (Aceh dan Papua) TA 2025 meningkat akibat peningkatan pagu DAU.
- Pagu DTI TA 2025 lebih rendah karena strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS TA 2025

- Mendorong prioritas penggunaan Dana Otsus, untuk:
 - Penurunan kemiskinan:** perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan.
 - Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah:** penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan.
 - Mendukung capaian rencana induk** percepatan pembangunan papua untuk mewujudkan papua sehat, papua cerdas, dan papua produktif.
- Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otsus** melalui sinergi pendanaan APBN dan APBD guna mendukung pencapaian target pembangunan.
- Meningkatkan kualitas SDM** pengelola Dana Otsus terutama di DOB, melalui asistensi dan pembinaan yang intensif dan berkesinambungan.
- Penggunaan DTI pada DOB, diprioritaskan untuk pembangunan **infrastruktur penunjang** gedung perkantoran.

PERKEMBANGAN & KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2025

PERKEMBANGAN DAIS TA 2023-2025



- Pagu alokasi Dana keistimewaan 2025 lebih rendah karena strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah oleh K/L serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

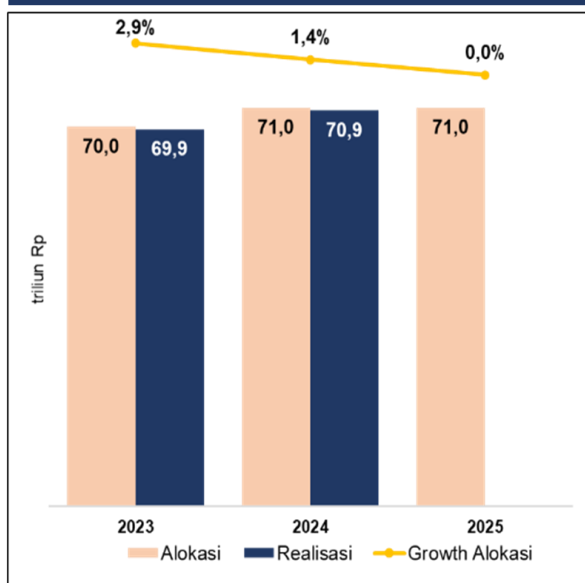
KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2025

- Mengarahkan **penggunaan** Dana Keistimewaan fokus untuk:
 - penurunan tingkat kemiskinan;
 - pemberdayaan masyarakat dan UMKM,
 - peningkatan penyediaan layanan dasar publik,
 - serta mengurangi belanja birokrasi penunjang, administrasi dan pengawasan;
- Meningkatkan **sinergi** dengan Belanja K/L untuk pencapaian **prioritas nasional** dengan mempertimbangkan prioritas daerah.
- Meningkatkan **tata kelola pemanfaatan** Dana Keistimewaan DIY yang inovatif, partisipatif, dan transparan **melalui** pengembangan **sistem informasi yang terintegrasi** secara berkelanjutan.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA DESA TA 2025

Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

PERKEMBANGAN DANA DESA TA 2023-2025



*) Outlook realisasi tahun 2024.

- Pagu Dana Desa tahun 2025 naik sebesar 0,2% dari outlook realisasi tahun 2024.

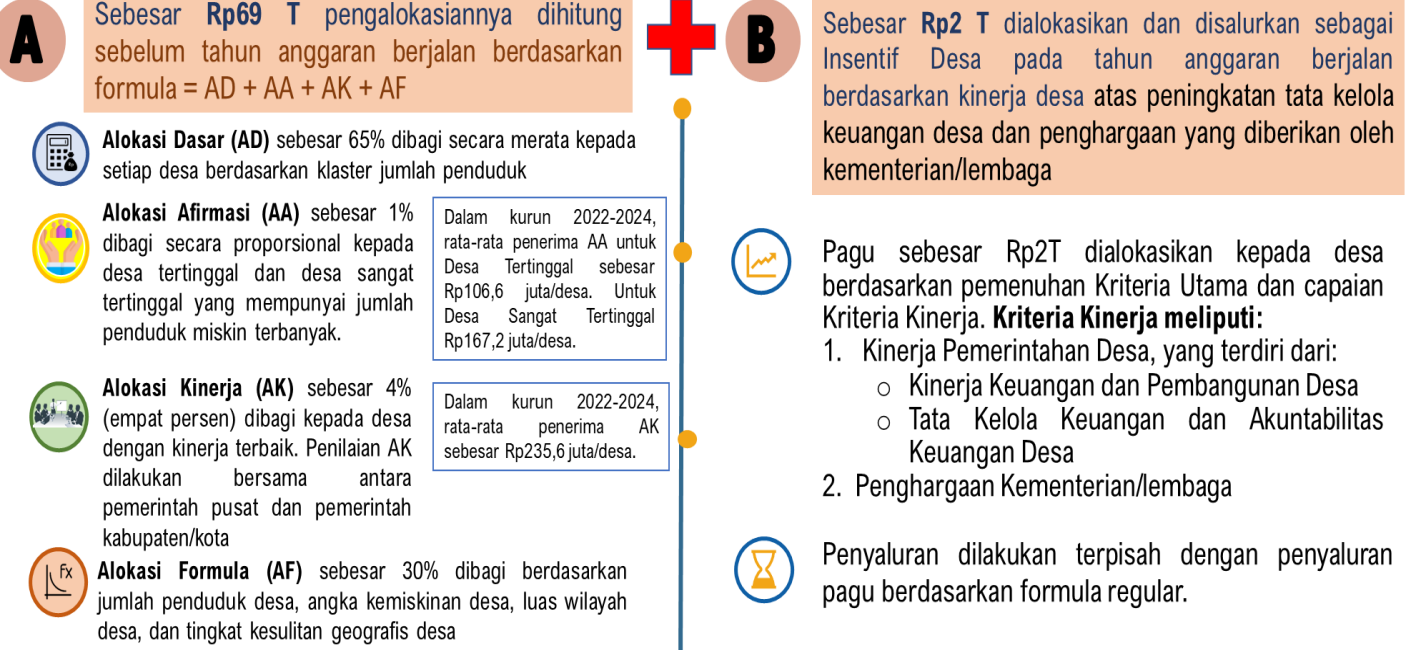
KEBIJAKAN DANA DESA TA 2025

- Mendorong peningkatan kemandirian desa & kualitas tata kelola Dana Desa melalui:
 - penyaluran Dana Desa berdasarkan fokus penggunaan yang ditetapkan,
 - penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD,
 - pemberian *reward* berupa alokasi kinerja dan insentif desa,
 - pemberian *reward* penyaluran Dana Desa lebih besar pada tahap I kepada desa berstatus Mandiri, dan
 - penerapan sanksi terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal.
- Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa melalui:
 - penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa paling tinggi 15%,
 - penguatan desa untuk aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim,
 - promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan desa termasuk stunting,
 - dukungan program ketahanan pangan,
 - pengembangan potensi dan keunggulan desa,
 - percepatan implementasi desa digital,
 - pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal,
 - operasional pemerintah desa paling tinggi 3%, dan/atau
 - program sektor prioritas lainnya di desa.
- Meningkatkan kualitas data keuangan desa berbasis elektronik terintegrasi dalam rangka memperkuat monitoring dan evaluasi.

FORMULA PENGALOKASIAN DANA DESA TA 2025

Pagu Rp71 T dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 Kab/Kota

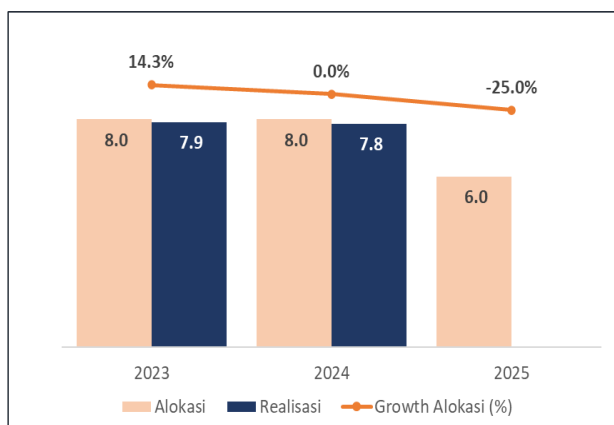
Yang terdiri atas:



PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL TA 2025

Mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata Kelola APBD

PERKEMBANGAN DANA INSENTIF FISKAL TA 2023-2025



- Outlook penyaluran insentif fiskal 2024 sebesar Rp7,8 triliun, dimana terdapat beberapa daerah yang tidak dapat disalurkan karena tidak memenuhi syarat salur
- Pagu Insentif Fiskal tahun 2025 lebih rendah karena kinerja daerah juga diperhitungkan di alokasi DAU dan DBH serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

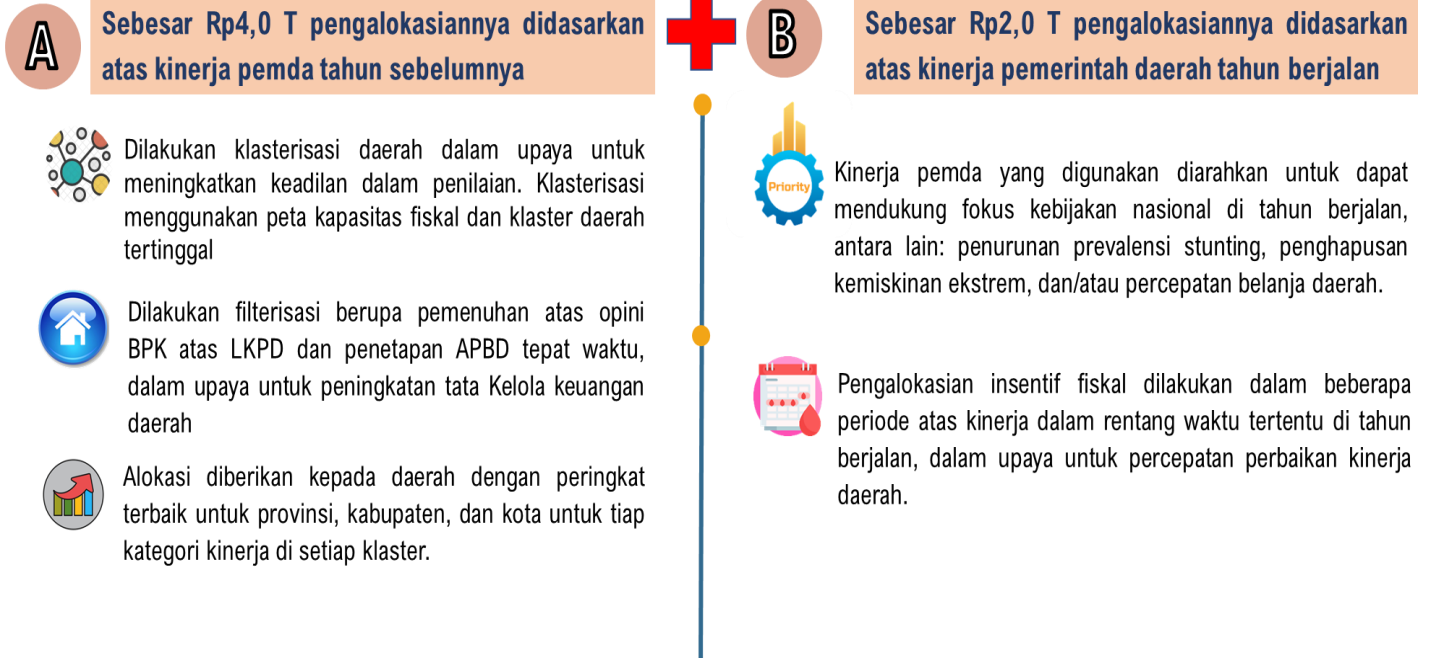
KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL TA 2025

- Pengalokasian berdasarkan **kinerja tahun anggaran sebelumnya** dan **tahun anggaran berjalan**;
- Indikator kinerja tahun sebelumnya meliputi **pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar**;
- Indikator kinerja tahun berjalan meliputi dukungan **pencapaian target prioritas nasional**
- Mendorong peran Insentif Fiskal untuk meningkatkan **kemandirian daerah**, antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain.
- Melanjutkan **pemberian Insentif Fiskal kepada daerah tertinggal** dengan tetap memperhatikan kinerja daerah tertinggal.

FORMULA PENGALOKASIAN INSENTIF FISKAL TA 2025

Pagu Rp6,0 T dialokasikan Atas Kinerja Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan

Yang terdiri atas:





RINCIAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH TA 2025



REKAPITULASI ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

NO	PEMERINTAH DAERAH	DANA BAGI HASIL	DANA ALOKASI UMUM	DAK FISIK	DAK NONFISIK	HIBAH KE DAERAH	DANA DESA	INSENTIF FISKAL	JUMLAH
1	PROVINSI JAWA TENGAH	2.088.035.022	4.010.900.533	246.919.384	3.638.173.412	-	-	8.436.080	9.992.464.431
2	KAB. BANJARNEGARA	24.525.132	985.468.010	80.301.666	375.131.184	29.461.281	272.904.953	-	1.767.792.226
3	KAB. BANYUMAS	42.145.556	1.473.124.314	68.726.882	599.192.477	-	342.797.744	22.732.017	2.548.718.990
4	KAB. BATANG	27.475.128	865.515.106	16.044.806	302.053.194	-	224.459.121	7.298.922	1.442.846.277
5	KAB. BLORA	236.747.823	1.021.200.859	86.371.542	374.781.848	-	256.669.506	15.820.542	1.991.592.120
6	KAB. BOYOLALI	23.419.879	1.038.285.498	53.872.990	345.706.149	-	265.082.092	7.108.181	1.733.474.789
7	KAB. BREBES	25.742.658	1.570.598.807	130.069.416	641.502.740	-	345.356.263	6.915.077	2.720.184.961
8	KAB. CILACAP	54.198.734	1.513.539.291	74.045.428	639.571.104	-	325.544.132	7.928.807	2.614.827.496
9	KAB. DEMAK	22.102.580	977.493.188	45.416.053	394.168.926	-	262.023.039	14.923.696	1.716.127.482
10	KAB. GROBOGAN	33.379.550	1.269.693.849	141.138.573	503.542.162	-	306.953.273	7.182.904	2.261.890.311
11	KAB. JEPARA	35.837.662	1.097.701.269	17.756.660	399.950.282	-	213.716.344	21.355.245	1.786.317.462
12	KAB. KARANGANYAR	28.466.317	1.013.219.837	137.629.429	356.258.085	-	178.732.306	16.530.129	1.730.836.103
13	KAB. KEBUMEN	18.900.123	1.298.026.342	27.497.044	507.803.310	-	434.223.563	24.263.191	2.310.713.573
14	KAB. KENDAL	28.070.362	1.036.240.311	40.147.526	400.552.442	-	262.618.980	14.773.497	1.782.403.118
15	KAB. KLATEN	23.859.127	1.260.627.683	51.142.908	445.854.792	-	370.427.124	15.899.300	2.167.810.934
16	KAB. KUDUS	93.274.830	837.282.514	23.052.616	246.845.067	-	140.654.773	21.938.998	1.363.048.798
17	KAB. MAGELANG	19.831.898	1.092.767.941	51.538.832	382.574.169	12.504.200	358.811.715	14.058.655	1.932.087.410
18	KAB. PATI	27.676.163	1.238.589.571	62.260.013	443.512.161	-	380.321.503	15.008.984	2.167.368.395
19	KAB. PEKALONGAN	17.842.695	975.432.823	15.790.735	349.487.471	-	263.467.476	7.151.300	1.629.172.500
20	KAB. PEMALANG	20.112.725	1.297.813.512	29.717.996	538.188.445	-	256.714.895	-	2.142.547.573
21	KAB. PURBALINGGA	18.501.664	918.393.960	26.905.222	354.606.673	13.454.500	241.575.450	-	1.573.437.469
22	KAB. PURWOREJO	17.173.537	1.037.833.918	63.258.790	313.587.231	-	368.832.284	6.604.227	1.807.289.987
23	KAB. REMBANG	23.929.281	833.343.177	29.276.283	274.975.910	-	244.386.951	7.621.391	1.413.532.993
24	KAB. SEMARANG	33.729.478	1.002.997.894	50.628.134	358.653.351	-	208.545.055	14.559.843	1.669.113.755
25	KAB. SRAGEN	20.893.567	1.099.208.649	44.028.891	369.994.143	-	210.976.657	16.102.300	1.761.204.207



REKAPITULASI ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

NO	PEMERINTAH DAERAH	DANA BAGI HASIL	DANA ALOKASI UMUM	DAK FISIK	DAK NONFISIK	HIBAH KE DAERAH	DANA DESA	INSENTIF FISKAL	JUMLAH
26	KAB. SUKOHARJO	29.187.600	936.479.707	19.046.579	283.101.319	-	162.725.313	13.734.253	1.444.274.771
27	KAB. TEGAL	24.815.153	1.268.676.659	52.700.301	510.436.651	-	321.870.852	7.233.792	2.185.733.408
28	KAB. TEMANGGUNG	18.348.906	845.234.730	81.787.260	301.698.907	-	238.898.620	9.002.280	1.494.970.703
29	KAB. WONOGIRI	18.382.285	1.163.179.498	45.991.582	428.113.030	-	250.053.184	16.647.494	1.922.367.073
30	KAB. WONOSOBO	18.605.614	880.149.101	44.425.785	333.497.091	-	235.940.209	-	1.512.617.800
31	KOTA MAGELANG	19.488.899	472.384.836	8.069.515	74.039.231	-	-	15.339.346	589.321.827
32	KOTA PEKALONGAN	22.079.697	488.347.066	37.611.051	110.552.175	-	-	7.216.498	665.806.487
33	KOTA SALATIGA	20.753.784	482.599.097	29.640.219	87.237.737	-	-	8.989.406	629.220.243
34	KOTA SEMARANG	215.762.848	1.309.335.423	15.211.477	497.591.746	-	-	29.551.806	2.067.453.300
35	KOTA SURAKARTA	50.988.671	892.061.136	861.641	232.956.430	-	-	6.920.583	1.183.788.461
36	KOTA TEGAL	23.978.888	514.681.931	27.249.067	119.047.382	-	-	-	684.957.268
JUMLAH		3.468.263.836	40.018.428.040	1.976.132.296	16.534.938.427	55.419.981	7.945.283.377	408.848.744	70.407.314.701

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI JAWA TENGAH

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	9.992.464.431
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	2.088.035.022
1. DBH Pajak	2.084.669.908
a. Pajak Penghasilan	575.727.394
b. Pajak Bumi dan Bangunan	46.977.489
c. Cukai Hasil Tembakau	1.461.965.025
2. DBH Sumber Daya Alam	3.365.114
a. Migas	861.863
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	96.633
c. Kehutanan	2.281.878
d. Perikanan	-
e. Panas Bumi	124.740
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	4.010.900.533
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	3.642.612.929
2. DAU ditentukan penggunaannya	368.287.604
a. Penggajian Formasi PPPK	97.130.383
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	185.898.217
d. Bidang Kesehatan	53.530.243
e. Bidang Pekerjaan Umum	31.728.761
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	3.885.092.796
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	246.919.384
a. Pendidikan	74.302.585
b. Kesehatan	16.366.185
c. Konektivitas	16.931.931
d. Air Minum	59.999.999
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	8.826.976
h. Pangan Pertanian	29.309.206
i. Pangan Akuatik	41.182.502
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	3.638.173.412
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	2.146.468.390
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	1.451.279.213
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	4.000.000
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	31.268.649
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	200.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.000.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	450.000
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.106.500
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	8.436.080

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. BANJARNEGARA



(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.767.792.226
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	24.525.132
1. DBH Pajak	23.528.409
a. Pajak Penghasilan	15.675.253
b. Pajak Bumi dan Bangunan	7.853.156
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	996.723
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.695
c. Kehutanan	114.870
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	4.438
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	985.468.010
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	873.295.064
2. DAU ditentukan penggunaannya	112.172.946
a. Penggajian Formasi PPPK	18.120.473
b. Pendanaan Kelurahan	2.400.000
c. Bidang Pendidikan	31.824.079
d. Bidang Kesehatan	23.235.975
e. Bidang Pekerjaan Umum	36.592.419
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	455.432.850
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	80.301.666
a. Pendidikan	784.957
b. Kesehatan	34.877.582
c. Konektivitas	17.514.743
d. Air Minum	990.060
e. Sanitasi	2.868.612
f. Perumahan dan Permukiman	7.301.663
g. Irigasi	9.793.205
h. Pangan Pertanian	6.170.844
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	375.131.184
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	120.459.600
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	200.762.866
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	35.375.713
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	10.352.800
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	800.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.380.205
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Hibah ke Daerah	29.461.281
1. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	29.461.281
2. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	-
E. Dana Desa	272.904.953
F. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KAB. BANYUMAS

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.548.718.990
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	42.145.556
1. DBH Pajak	40.978.167
a. Pajak Penghasilan	35.239.312
b. Pajak Bumi dan Bangunan	5.738.855
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.167.389
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	74.016
c. Kehutanan	213.215
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	4.438
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.473.124.314
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.276.854.777
2. DAU ditentukan penggunaannya	196.269.537
a. Penggajian Formasi PPPK	25.387.248
b. Pendanaan Kelurahan	6.000.000
c. Bidang Pendidikan	100.406.001
d. Bidang Kesehatan	34.985.875
e. Bidang Pekerjaan Umum	29.490.413
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	667.919.359
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	68.726.882
a. Pendidikan	1.224.178
b. Kesehatan	50.067.204
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	12.804.981
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.630.519
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	599.192.477
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	217.803.850
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	312.040.307
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	1.394.990
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	49.552.670
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	17.000.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.000.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	342.797.744
E. Insentif Fiskal	22.732.017

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. BATANG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.442.846.277
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	27.475.128
1. DBH Pajak	26.157.364
a. Pajak Penghasilan	20.138.339
b. Pajak Bumi dan Bangunan	6.019.025
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.317.764
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	321
c. Kehutanan	304.826
d. Perikanan	966.264
e. Panas Bumi	4.438
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	865.515.106
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	787.374.210
2. DAU ditentukan penggunaannya	78.140.896
a. Penggajian Formasi PPPK	9.710.715
b. Pendanaan Kelurahan	1.800.000
c. Bidang Pendidikan	30.541.313
d. Bidang Kesehatan	20.504.405
e. Bidang Pekerjaan Umum	15.584.463
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	318.098.000
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	16.044.806
a. Pendidikan	786.194
b. Kesehatan	5.900.860
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	7.028.872
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	2.328.880
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	302.053.194
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	103.088.050
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	165.409.619
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	22.428.640
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	10.376.885
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	224.459.121
E. Insentif Fiskal	7.298.922

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. BLORA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.991.592.120
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	236.747.823
1. DBH Pajak	103.837.142
a. Pajak Penghasilan	14.953.000
b. Pajak Bumi dan Bangunan	88.884.142
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	132.910.681
a. Migas	130.057.550
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	-
c. Kehutanan	1.997.425
d. Perikanan	851.176
e. Panas Bumi	4.530
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.021.200.859
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	867.417.170
2. DAU ditentukan penggunaannya	153.783.689
a. Penggajian Formasi PPPK	63.700.433
b. Pendanaan Kelurahan	4.800.000
c. Bidang Pendidikan	34.340.751
d. Bidang Kesehatan	23.337.164
e. Bidang Pekerjaan Umum	27.605.341
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	461.153.390
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	86.371.542
a. Pendidikan	907.867
b. Kesehatan	37.261.018
c. Konektivitas	20.806.681
d. Air Minum	378.207
e. Sanitasi	6.794.682
f. Perumahan dan Permukiman	3.466.637
g. Irigasi	7.495.921
h. Pangan Pertanian	9.260.529
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	374.781.848
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	111.429.160
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	213.140.980
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	31.724.978
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	11.800.100
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.000.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.686.630
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	256.669.506
E. Insentif Fiskal	15.820.542

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. BOYOLALI

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.733.474.789
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	23.419.879
1. DBH Pajak	22.394.450
a. Pajak Penghasilan	19.050.397
b. Pajak Bumi dan Bangunan	3.344.053
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.025.429
a. Migas	54.094
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	3.666
c. Kehutanan	113.472
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	20.392
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.038.285.498
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	939.537.820
2. DAU ditentukan penggunaannya	98.747.678
a. Penggajian Formasi PPPK	29.531.725
b. Pendanaan Kelurahan	1.200.000
c. Bidang Pendidikan	33.044.329
d. Bidang Kesehatan	25.663.926
e. Bidang Pekerjaan Umum	9.307.698
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	399.579.139
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	53.872.990
a. Pendidikan	665.121
b. Kesehatan	18.641.097
c. Konektivitas	20.023.604
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	5.296.325
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	9.246.843
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	345.706.149
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	113.999.000
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	188.101.175
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	658.355
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	29.432.619
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	12.515.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.000.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	265.082.092
E. Insentif Fiskal	7.108.181

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. BREBES

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.720.184.961
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	25.742.658
1. DBH Pajak	24.459.945
a. Pajak Penghasilan	17.693.089
b. Pajak Bumi dan Bangunan	6.766.856
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.282.713
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	907
c. Kehutanan	217.483
d. Perikanan	1.017.970
e. Panas Bumi	4.438
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.570.598.807
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.349.199.800
2. DAU ditentukan penggunaannya	221.399.007
a. Penggajian Formasi PPPK	11.151.060
b. Pendanaan Kelurahan	1.000.000
c. Bidang Pendidikan	106.295.883
d. Bidang Kesehatan	76.199.275
e. Bidang Pekerjaan Umum	26.752.789
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	771.572.156
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	130.069.416
a. Pendidikan	2.374.932
b. Kesehatan	19.810.220
c. Konektivitas	66.470.327
d. Air Minum	6.970.345
e. Sanitasi	9.195.563
f. Perumahan dan Permukiman	9.065.536
g. Irigasi	8.155.825
h. Pangan Pertanian	8.026.668
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	641.502.740
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	244.391.890
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	325.754.992
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	45.916.958
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	19.275.700
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.413.200
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	345.356.263
E. Insentif Fiskal	6.915.077

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. CILACAP

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.614.827.496
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	54.198.734
1. DBH Pajak	52.095.255
a. Pajak Penghasilan	39.623.920
b. Pajak Bumi dan Bangunan	12.471.335
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.603.479
a. Migas	175.743
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	20.747
c. Kehutanan	226.143
d. Perikanan	1.176.408
e. Panas Bumi	4.438
3. DBH Lainnya	500.000
a. Perkebunan Sawit	500.000
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.513.539.291
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.360.492.467
2. DAU ditentukan penggunaannya	153.046.824
a. Penggajian Formasi PPPK	34.847.064
b. Pendanaan Kelurahan	3.000.000
c. Bidang Pendidikan	51.217.720
d. Bidang Kesehatan	36.459.720
e. Bidang Pekerjaan Umum	27.522.320
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	713.616.532
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	74.045.428
a. Pendidikan	1.686.662
b. Kesehatan	3.629.245
c. Konektivitas	44.452.510
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	9.677.004
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	1.057.532
h. Pangan Pertanian	13.542.475
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	639.571.104
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	232.811.950
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	336.496.238
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	46.427.796
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	16.000.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.434.460
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	325.544.132
E. Insentif Fiskal	7.928.807

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. DEMAK

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.716.127.482
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	22.102.580
1. DBH Pajak	20.937.396
a. Pajak Penghasilan	18.728.248
b. Pajak Bumi dan Bangunan	2.209.148
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.165.184
a. Migas	54.094
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	-
c. Kehutanan	123.660
d. Perikanan	977.545
e. Panas Bumi	9.885
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	977.493.188
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	894.517.558
2. DAU ditentukan penggunaannya	82.975.630
a. Penggajian Formasi PPPK	15.007.469
b. Pendanaan Kelurahan	1.200.000
c. Bidang Pendidikan	33.739.561
d. Bidang Kesehatan	23.025.127
e. Bidang Pekerjaan Umum	10.003.473
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	439.584.979
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	45.416.053
a. Pendidikan	1.959.633
b. Kesehatan	23.383.300
c. Konektivitas	13.066.628
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	7.006.492
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	394.168.926
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	158.529.350
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	193.172.534
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	568.000
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	29.399.042
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	12.000.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	262.023.039
E. Insentif Fiskal	14.923.696

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KAB. GROBOGAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.261.890.311
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	33.379.550
1. DBH Pajak	31.455.956
a. Pajak Penghasilan	15.627.101
b. Pajak Bumi dan Bangunan	15.828.855
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.923.594
a. Migas	455.289
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	16.429
c. Kehutanan	607.921
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	10.150
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.269.693.849
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.151.335.407
2. DAU ditentukan penggunaannya	118.358.442
a. Penggajian Formasi PPPK	19.746.670
b. Pendanaan Kelurahan	1.400.000
c. Bidang Pendidikan	44.596.000
d. Bidang Kesehatan	30.207.007
e. Bidang Pekerjaan Umum	22.408.765
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	644.680.735
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	141.138.573
a. Pendidikan	728.018
b. Kesehatan	51.571.958
c. Konektivitas	18.433.928
d. Air Minum	1.728.791
e. Sanitasi	9.701.026
f. Perumahan dan Permukiman	7.545.378
g. Irigasi	14.889.230
h. Pangan Pertanian	36.540.244
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	503.542.162
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	180.067.500
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	264.883.853
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	692.070
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	35.534.354
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	13.591.500
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	749.855
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.023.030
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	306.953.273
E. Insentif Fiskal	7.182.904

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. JEPARA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.786.317.462
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	35.837.662
1. DBH Pajak	33.562.975
a. Pajak Penghasilan	27.009.049
b. Pajak Bumi dan Bangunan	6.553.926
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	2.274.687
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.014
c. Kehutanan	258.542
d. Perikanan	1.968.778
e. Panas Bumi	4.438
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.097.701.269
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	982.597.625
2. DAU ditentukan penggunaannya	115.103.644
a. Penggajian Formasi PPPK	28.621.055
b. Pendanaan Kelurahan	2.200.000
c. Bidang Pendidikan	36.805.087
d. Bidang Kesehatan	26.375.042
e. Bidang Pekerjaan Umum	21.102.460
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	417.706.942
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	17.756.660
a. Pendidikan	1.663.632
b. Kesehatan	3.601.150
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	12.491.878
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	399.950.282
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	154.439.106
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	204.959.465
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	702.280
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	26.869.731
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	12.229.700
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	213.716.344
E. Insentif Fiskal	21.355.245

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. KARANGANYAR

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.730.836.103
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	28.466.317
1. DBH Pajak	27.496.153
a. Pajak Penghasilan	23.904.454
b. Pajak Bumi dan Bangunan	3.591.699
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	970.164
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	172
c. Kehutanan	89.569
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	4.703
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.013.219.837
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	899.311.760
2. DAU ditentukan penggunaannya	113.908.077
a. Penggajian Formasi PPPK	5.928.647
b. Pendanaan Kelurahan	3.000.000
c. Bidang Pendidikan	68.909.169
d. Bidang Kesehatan	23.319.761
e. Bidang Pekerjaan Umum	12.750.500
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	493.887.514
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	137.629.429
a. Pendidikan	2.991.993
b. Kesehatan	2.482.005
c. Konektivitas	124.319.100
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	7.836.331
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	356.258.085
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	115.455.450
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	201.295.166
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	28.819.189
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	9.287.620
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.000.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	178.732.306
E. Insentif Fiskal	16.530.129

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. KEBUMEN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.310.713.573
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	18.900.123
1. DBH Pajak	17.664.618
a. Pajak Penghasilan	15.194.411
b. Pajak Bumi dan Bangunan	2.470.207
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.235.505
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.061
c. Kehutanan	126.428
d. Perikanan	1.061.663
e. Panas Bumi	4.438
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.298.026.342
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.135.281.360
2. DAU ditentukan penggunaannya	162.744.982
a. Penggajian Formasi PPPK	15.146.857
b. Pendanaan Kelurahan	2.200.000
c. Bidang Pendidikan	88.612.618
d. Bidang Kesehatan	30.807.786
e. Bidang Pekerjaan Umum	25.977.721
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	535.300.354
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	27.497.044
a. Pendidikan	3.657.932
b. Kesehatan	10.838.049
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	13.001.063
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	507.803.310
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	165.580.800
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	283.923.023
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	40.199.487
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	17.000.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.100.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	434.223.563
E. Insentif Fiskal	24.263.191

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. KENDAL

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.782.403.118
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	28.070.362
1. DBH Pajak	26.728.014
a. Pajak Penghasilan	18.610.665
b. Pajak Bumi dan Bangunan	8.117.349
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.342.348
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	-
c. Kehutanan	269.038
d. Perikanan	1.018.411
e. Panas Bumi	12.984
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.036.240.311
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	867.294.633
2. DAU ditentukan penggunaannya	168.945.678
a. Penggajian Formasi PPPK	54.677.366
b. Pendanaan Kelurahan	4.000.000
c. Bidang Pendidikan	76.230.347
d. Bidang Kesehatan	23.838.803
e. Bidang Pekerjaan Umum	10.199.162
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	440.699.968
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	40.147.526
a. Pendidikan	1.605.665
b. Kesehatan	17.841.525
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	9.861.774
f. Perumahan dan Permukiman	4.043.277
g. Irigasi	6.795.285
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	400.552.442
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	141.476.180
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	210.095.181
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	35.850.258
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	11.654.500
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.075.663
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	262.618.980
E. Insentif Fiskal	14.773.497

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. KLATEN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.167.810.934
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	23.859.127
1. DBH Pajak	22.909.753
a. Pajak Penghasilan	21.031.042
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.878.711
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	949.374
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.395
c. Kehutanan	67.556
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	4.703
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.260.627.683
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.193.052.951
2. DAU ditentukan penggunaannya	67.574.732
a. Penggajian Formasi PPPK	11.731.845
b. Pendanaan Kelurahan	2.000.000
c. Bidang Pendidikan	43.756.309
d. Bidang Kesehatan	-
e. Bidang Pekerjaan Umum	10.086.578
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	496.997.700
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	51.142.908
a. Pendidikan	2.351.854
b. Kesehatan	1.706.388
c. Konektivitas	21.640.723
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	15.335.609
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	1.952.369
h. Pangan Pertanian	8.155.965
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	445.854.792
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	148.873.700
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	235.159.787
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	36.630.940
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	14.130.700
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.909.005
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	370.427.124
E. Insentif Fiskal	15.899.300

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KAB. KUDUS

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.363.048.798
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	93.274.830
1. DBH Pajak	92.242.826
a. Pajak Penghasilan	90.436.880
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.805.946
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.032.004
a. Migas	54.094
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	-
c. Kehutanan	139.667
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	4.438
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	837.282.514
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	764.090.268
2. DAU ditentukan penggunaannya	73.192.246
a. Penggajian Formasi PPPK	16.261.963
b. Pendanaan Kelurahan	1.800.000
c. Bidang Pendidikan	26.393.951
d. Bidang Kesehatan	20.578.606
e. Bidang Pekerjaan Umum	8.157.726
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	269.897.683
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	23.052.616
a. Pendidikan	11.285.555
b. Kesehatan	11.767.061
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	246.845.067
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	93.904.700
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	122.981.478
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	2.517.235
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	19.690.109
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	7.751.545
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	140.654.773
E. Insentif Fiskal	21.938.998

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. MAGELANG



(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.932.087.410
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	19.831.898
1. DBH Pajak	18.764.194
a. Pajak Penghasilan	16.424.306
b. Pajak Bumi dan Bangunan	2.339.888
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.067.704
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.362
c. Kehutanan	88.428
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	102.194
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.092.767.941
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	979.404.019
2. DAU ditentukan penggunaannya	113.363.922
a. Penggajian Formasi PPPK	13.358.041
b. Pendanaan Kelurahan	1.000.000
c. Bidang Pendidikan	33.384.975
d. Bidang Kesehatan	53.437.929
e. Bidang Pekerjaan Umum	12.182.977
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	434.113.001
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	51.538.832
a. Pendidikan	1.778.488
b. Kesehatan	39.821.918
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	9.938.426
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	382.574.169
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	136.944.250
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	199.588.417
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	28.584.692
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	16.258.100
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	798.050
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Hibah ke Daerah	12.504.200
1. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	12.504.200
2. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	-
E. Dana Desa	358.811.715
F. Insentif Fiskal	14.058.655

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. PATI

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.167.368.395
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	27.676.163
1. DBH Pajak	25.833.116
a. Pajak Penghasilan	19.576.849
b. Pajak Bumi dan Bangunan	6.256.267
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.843.047
a. Migas	253.320
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	255
c. Kehutanan	563.482
d. Perikanan	1.021.552
e. Panas Bumi	4.438
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.238.589.571
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.132.175.248
2. DAU ditentukan penggunaannya	106.414.323
a. Penggajian Formasi PPPK	25.066.655
b. Pendanaan Kelurahan	1.000.000
c. Bidang Pendidikan	39.576.108
d. Bidang Kesehatan	30.943.103
e. Bidang Pekerjaan Umum	9.828.457
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	505.772.174
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	62.260.013
a. Pendidikan	2.209.286
b. Kesehatan	3.769.840
c. Konektivitas	22.075.427
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	6.890.348
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	899.376
h. Pangan Pertanian	12.064.736
i. Pangan Akuatik	14.351.000
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	443.512.161
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	149.125.560
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	238.049.832
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	35.319.265
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	13.641.414
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.975.430
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	380.321.503
E. Insentif Fiskal	15.008.984

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KAB. PEKALONGAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.629.172.500
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	17.842.695
1. DBH Pajak	16.755.702
a. Pajak Penghasilan	12.263.901
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.491.801
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.086.993
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	54
c. Kehutanan	168.034
d. Perikanan	872.552
e. Panas Bumi	4.438
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	975.432.823
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	852.836.811
2. DAU ditentukan penggunaannya	122.596.012
a. Penggajian Formasi PPPK	9.222.856
b. Pendanaan Kelurahan	2.600.000
c. Bidang Pendidikan	69.284.981
d. Bidang Kesehatan	22.891.468
e. Bidang Pekerjaan Umum	18.596.707
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	365.278.206
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	15.790.735
a. Pendidikan	1.270.660
b. Kesehatan	8.440.803
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	6.079.272
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	349.487.471
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	128.139.560
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	179.914.602
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	29.586.309
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	11.097.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	263.467.476
E. Insentif Fiskal	7.151.300

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. PEMALANG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.142.547.573
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	20.112.725
1. DBH Pajak	18.623.531
a. Pajak Penghasilan	13.539.796
b. Pajak Bumi dan Bangunan	5.083.735
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.489.194
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	2.399
c. Kehutanan	469.883
d. Perikanan	970.559
e. Panas Bumi	4.438
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.297.813.512
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.095.337.369
2. DAU ditentukan penggunaannya	202.476.143
a. Penggajian Formasi PPPK	24.253.557
b. Pendanaan Kelurahan	2.200.000
c. Bidang Pendidikan	96.595.423
d. Bidang Kesehatan	61.669.631
e. Bidang Pekerjaan Umum	17.757.532
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	567.906.441
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	29.717.996
a. Pendidikan	762.727
b. Kesehatan	5.016.651
c. Konektivitas	20.549.934
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	3.388.684
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	538.188.445
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	202.611.600
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	283.329.556
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	30.796.714
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	15.600.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.699.915
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	256.714.895
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. PURBALINGGA



(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.573.437.469
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	18.501.664
1. DBH Pajak	17.496.901
a. Pajak Penghasilan	15.331.109
b. Pajak Bumi dan Bangunan	2.165.792
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.004.763
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.255
c. Kehutanan	123.350
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	4.438
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	918.393.960
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	830.047.273
2. DAU ditentukan penggunaannya	88.346.687
a. Penggajian Formasi PPPK	11.383.374
b. Pendanaan Kelurahan	3.000.000
c. Bidang Pendidikan	28.450.712
d. Bidang Kesehatan	21.876.530
e. Bidang Pekerjaan Umum	23.636.071
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	381.511.895
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	26.905.222
a. Pendidikan	1.802.908
b. Kesehatan	20.118.548
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.983.766
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	354.606.673
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	115.062.400
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	199.894.229
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	562.614
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	26.936.770
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	11.000.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Hibah ke Daerah	13.454.500
1. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	13.454.500
2. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	-
E. Dana Desa	241.575.450
F. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. PURWOREJO

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.807.289.987
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	17.173.537
1. DBH Pajak	16.109.549
a. Pajak Penghasilan	13.714.113
b. Pajak Bumi dan Bangunan	2.395.436
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.063.988
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	5.071
c. Kehutanan	93.643
d. Perikanan	914.705
e. Panas Bumi	8.654
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.037.833.918
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	924.627.985
2. DAU ditentukan penggunaannya	113.205.933
a. Penggajian Formasi PPPK	22.302.121
b. Pendanaan Kelurahan	5.000.000
c. Bidang Pendidikan	35.629.377
d. Bidang Kesehatan	23.724.021
e. Bidang Pekerjaan Umum	26.550.414
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	376.846.021
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	63.258.790
a. Pendidikan	407.928
b. Kesehatan	40.534.214
c. Konektivitas	12.449.656
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	6.821.479
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	3.045.513
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	313.587.231
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	96.102.000
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	177.544.599
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	639.634
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	26.252.140
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	11.898.198
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	368.832.284
E. Insentif Fiskal	6.604.227

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. REMBANG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.413.532.993
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	23.929.281
1. DBH Pajak	21.176.334
a. Pajak Penghasilan	14.295.319
b. Pajak Bumi dan Bangunan	6.881.015
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	2.752.947
a. Migas	879.543
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	15.878
c. Kehutanan	738.649
d. Perikanan	1.114.439
e. Panas Bumi	4.438
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	833.343.177
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	717.688.291
2. DAU ditentukan penggunaannya	115.654.886
a. Penggajian Formasi PPPK	54.881.802
b. Pendanaan Kelurahan	1.400.000
c. Bidang Pendidikan	30.792.859
d. Bidang Kesehatan	18.611.230
e. Bidang Pekerjaan Umum	9.968.995
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	304.252.193
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	29.276.283
a. Pendidikan	768.399
b. Kesehatan	5.163.368
c. Konektivitas	18.247.147
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	5.097.369
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	274.975.910
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	91.495.410
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	147.356.847
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	569.375
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	27.054.278
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	8.000.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	244.386.951
E. Insentif Fiskal	7.621.391

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.669.113.755
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	33.729.478
1. DBH Pajak	32.559.747
a. Pajak Penghasilan	26.091.642
b. Pajak Bumi dan Bangunan	6.468.105
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.169.731
a. Migas	54.094
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	926
c. Kehutanan	152.494
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	128.412
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.002.997.894
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	905.872.925
2. DAU ditentukan penggunaannya	97.124.969
a. Penggajian Formasi PPPK	24.021.243
b. Pendanaan Kelurahan	5.400.000
c. Bidang Pendidikan	34.064.729
d. Bidang Kesehatan	23.960.999
e. Bidang Pekerjaan Umum	9.677.998
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	409.281.485
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	50.628.134
a. Pendidikan	1.721.552
b. Kesehatan	10.914.030
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	550.000
e. Sanitasi	8.300.521
f. Perumahan dan Permukiman	18.798.352
g. Irigasi	10.343.679
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	358.653.351
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	131.612.460
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	187.104.008
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	27.220.642
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	12.716.241
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	208.545.055
E. Insentif Fiskal	14.559.843

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. SRAGEN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.761.204.207
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	20.893.567
1. DBH Pajak	19.876.725
a. Pajak Penghasilan	16.561.707
b. Pajak Bumi dan Bangunan	3.315.018
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.016.842
a. Migas	54.094
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	465
c. Kehutanan	123.775
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	4.703
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.099.208.649
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	974.508.866
2. DAU ditentukan penggunaannya	124.699.783
a. Penggajian Formasi PPPK	8.883.678
b. Pendanaan Kelurahan	2.400.000
c. Bidang Pendidikan	73.216.887
d. Bidang Kesehatan	25.175.193
e. Bidang Pekerjaan Umum	15.024.025
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	414.023.034
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	44.028.891
a. Pendidikan	750.570
b. Kesehatan	6.408.186
c. Konektivitas	20.796.114
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	5.921.198
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	7.221.714
h. Pangan Pertanian	2.931.109
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	369.994.143
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	120.212.100
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	196.845.374
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	36.525.539
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	10.695.470
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.000.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.715.660
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	210.976.657
E. Insentif Fiskal	16.102.300

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. SUKOHARJO

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.444.274.771
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	29.187.600
1. DBH Pajak	28.238.383
a. Pajak Penghasilan	26.181.618
b. Pajak Bumi dan Bangunan	2.056.765
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	949.217
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	236
c. Kehutanan	68.558
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	4.703
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	936.479.707
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	880.891.279
2. DAU ditentukan penggunaannya	55.588.428
a. Penggajian Formasi PPPK	12.870.182
b. Pendanaan Kelurahan	3.400.000
c. Bidang Pendidikan	30.254.869
d. Bidang Kesehatan	-
e. Bidang Pekerjaan Umum	9.063.377
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	302.147.898
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	19.046.579
a. Pendidikan	12.446.754
b. Kesehatan	3.630.895
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	2.968.930
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	283.101.319
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	97.311.850
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	157.909.503
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	17.509.006
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	10.370.960
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	162.725.313
E. Insentif Fiskal	13.734.253

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. TEGAL

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.185.733.408
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	24.815.153
1. DBH Pajak	23.512.968
a. Pajak Penghasilan	19.252.453
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.260.515
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.302.185
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.375
c. Kehutanan	337.597
d. Perikanan	916.860
e. Panas Bumi	4.438
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.268.676.659
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.119.935.912
2. DAU ditentukan penggunaannya	148.740.747
a. Penggajian Formasi PPPK	18.585.101
b. Pendanaan Kelurahan	1.200.000
c. Bidang Pendidikan	89.103.691
d. Bidang Kesehatan	30.820.434
e. Bidang Pekerjaan Umum	9.031.521
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	563.136.952
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	52.700.301
a. Pendidikan	2.024.167
b. Kesehatan	28.450.459
c. Konektivitas	9.370.800
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	7.928.293
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	4.926.582
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	510.436.651
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	202.931.877
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	253.212.161
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	36.258.453
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	14.527.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.106.500
D. Dana Desa	321.870.852
E. Insentif Fiskal	7.233.792

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. TEMANGGUNG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.494.970.703
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	18.348.906
1. DBH Pajak	17.334.161
a. Pajak Penghasilan	15.060.174
b. Pajak Bumi dan Bangunan	2.273.987
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.014.745
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	-
c. Kehutanan	92.233
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	46.792
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	845.234.730
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	765.015.809
2. DAU ditentukan penggunaannya	80.218.921
a. Penggajian Formasi PPPK	8.688.535
b. Pendanaan Kelurahan	4.600.000
c. Bidang Pendidikan	27.931.589
d. Bidang Kesehatan	20.029.569
e. Bidang Pekerjaan Umum	18.969.228
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	383.486.167
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	81.787.260
a. Pendidikan	5.165.437
b. Kesehatan	26.414.321
c. Konektivitas	19.287.631
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	9.050.198
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	15.607.409
h. Pangan Pertanian	6.262.264
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	301.698.907
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	96.225.890
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	159.410.861
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	30.044.787
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	11.439.157
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.089.412
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.488.800
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	238.898.620
E. Insentif Fiskal	9.002.280

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. WONOGIRI

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.922.367.073
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	18.382.285
1. DBH Pajak	17.379.485
a. Pajak Penghasilan	14.642.464
b. Pajak Bumi dan Bangunan	2.737.021
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.002.800
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	10.365
c. Kehutanan	85.821
d. Perikanan	860.261
e. Panas Bumi	4.438
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.163.179.498
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.062.553.948
2. DAU ditentukan penggunaannya	100.625.550
a. Penggajian Formasi PPPK	12.544.943
b. Pendanaan Kelurahan	8.600.000
c. Bidang Pendidikan	36.121.866
d. Bidang Kesehatan	27.386.950
e. Bidang Pekerjaan Umum	15.971.791
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	474.104.612
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	45.991.582
a. Pendidikan	955.400
b. Kesehatan	7.996.020
c. Konektivitas	18.925.113
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	5.532.379
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	6.734.719
h. Pangan Pertanian	5.847.951
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	428.113.030
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	119.621.890
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	252.062.743
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	630.553
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	36.509.319
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	11.831.975
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	827.835
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.628.715
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	250.053.184
E. Insentif Fiskal	16.647.494

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KAB. WONOSOBO

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.512.617.800
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	18.605.614
1. DBH Pajak	17.580.796
a. Pajak Penghasilan	12.321.886
b. Pajak Bumi dan Bangunan	5.258.910
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.024.818
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	-
c. Kehutanan	137.345
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	11.753
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	880.149.101
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	778.073.760
2. DAU ditentukan penggunaannya	102.075.341
a. Penggajian Formasi PPPK	10.082.417
b. Pendanaan Kelurahan	5.800.000
c. Bidang Pendidikan	29.741.449
d. Bidang Kesehatan	19.996.517
e. Bidang Pekerjaan Umum	36.454.958
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	377.922.876
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	44.425.785
a. Pendidikan	851.783
b. Kesehatan	14.521.424
c. Konektivitas	29.052.578
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	333.497.091
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	115.223.239
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	174.287.136
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	33.670.907
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	9.998.103
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	317.706
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	235.940.209
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA MAGELANG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	589.321.827
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	19.488.899
1. DBH Pajak	18.537.890
a. Pajak Penghasilan	17.375.107
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.162.783
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	951.009
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	-
c. Kehutanan	66.635
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	8.654
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	472.384.836
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	427.366.116
2. DAU ditentukan penggunaannya	45.018.720
a. Penggajian Formasi PPPK	4.646.275
b. Pendanaan Kelurahan	3.400.000
c. Bidang Pendidikan	22.485.071
d. Bidang Kesehatan	9.171.937
e. Bidang Pekerjaan Umum	5.315.437
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	82.108.746
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	8.069.515
a. Pendidikan	4.459.858
b. Kesehatan	-
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	3.609.657
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	74.039.231
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	27.614.500
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	37.111.745
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	7.412.326
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	1.500.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	15.339.346

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA PEKALONGAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	665.806.487
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	22.079.697
1. DBH Pajak	21.084.889
a. Pajak Penghasilan	19.760.965
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.323.924
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	994.808
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	-
c. Kehutanan	90.848
d. Perikanan	857.607
e. Panas Bumi	4.438
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	488.347.066
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	446.618.816
2. DAU ditentukan penggunaannya	41.728.250
a. Penggajian Formasi PPPK	3.484.706
b. Pendanaan Kelurahan	5.400.000
c. Bidang Pendidikan	17.821.109
d. Bidang Kesehatan	11.716.394
e. Bidang Pekerjaan Umum	3.306.041
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	148.163.226
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	37.611.051
a. Pendidikan	1.977.849
b. Kesehatan	22.030.970
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	965.000
e. Sanitasi	1.568.260
f. Perumahan dan Permukiman	11.068.972
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	110.552.175
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	39.890.000
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	51.456.914
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	796.500
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	15.384.661
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.024.100
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	7.216.498

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA SALATIGA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	629.220.243
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	20.753.784
1. DBH Pajak	19.795.997
a. Pajak Penghasilan	18.489.304
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.306.693
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	957.787
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	-
c. Kehutanan	68.308
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	13.759
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	482.599.097
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	458.135.299
2. DAU ditentukan penggunaannya	24.463.798
a. Penggajian Formasi PPPK	2.090.824
b. Pendanaan Kelurahan	4.600.000
c. Bidang Pendidikan	17.772.974
d. Bidang Kesehatan	-
e. Bidang Pekerjaan Umum	-
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	116.877.956
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	29.640.219
a. Pendidikan	633.200
b. Kesehatan	14.694.084
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	556.471
e. Sanitasi	4.201.214
f. Perumahan dan Permukiman	9.555.250
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	87.237.737
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	33.563.950
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	43.515.878
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	6.208.249
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.449.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.100.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	8.989.406

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.067.453.300
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	215.762.848
1. DBH Pajak	214.705.966
a. Pajak Penghasilan	209.792.446
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.913.520
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.056.882
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	-
c. Kehutanan	107.280
d. Perikanan	897.802
e. Panas Bumi	9.885
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.309.335.423
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.165.539.019
2. DAU ditentukan penggunaannya	143.796.404
a. Penggajian Formasi PPPK	49.324.858
b. Pendanaan Kelurahan	35.400.000
c. Bidang Pendidikan	50.006.725
d. Bidang Kesehatan	-
e. Bidang Pekerjaan Umum	9.064.821
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	512.803.223
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	15.211.477
a. Pendidikan	10.562.897
b. Kesehatan	1.524.750
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	3.123.830
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	497.591.746
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	223.281.920
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	207.981.140
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	50.524.726
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	12.296.800
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.106.500
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	29.551.806

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA SURAKARTA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.183.788.461
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	50.988.671
1. DBH Pajak	50.041.311
a. Pajak Penghasilan	48.553.725
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.487.586
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	947.360
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	-
c. Kehutanan	66.937
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	4.703
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	892.061.136
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	824.726.366
2. DAU ditentukan penggunaannya	67.334.770
a. Penggajian Formasi PPPK	12.219.704
b. Pendanaan Kelurahan	10.800.000
c. Bidang Pendidikan	39.654.389
d. Bidang Kesehatan	-
e. Bidang Pekerjaan Umum	4.660.677
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	233.818.071
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	861.641
a. Pendidikan	861.641
b. Kesehatan	-
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	232.956.430
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	96.607.750
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	97.842.418
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	3.442.500
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	25.382.372
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.969.200
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.100.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.106.500
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	6.920.583

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA TEGAL

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	684.957.268
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	23.978.888
1. DBH Pajak	22.973.557
a. Pajak Penghasilan	21.617.543
b. Pajak Bumi dan Bangunan	1.356.014
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	1.005.331
a. Migas	41.915
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	-
c. Kehutanan	101.312
d. Perikanan	857.666
e. Panas Bumi	4.438
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	514.681.931
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	453.401.836
2. DAU ditentukan penggunaannya	61.280.095
a. Penggajian Formasi PPPK	30.275.130
b. Pendanaan Kelurahan	5.400.000
c. Bidang Pendidikan	19.650.681
d. Bidang Kesehatan	-
e. Bidang Pekerjaan Umum	5.954.284
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	146.296.449
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	27.249.067
a. Pendidikan	1.249.892
b. Kesehatan	20.800.000
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	5.199.175
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	119.047.382
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	44.400.100
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	59.737.411
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	11.904.181
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.500.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	-

TIM PENYUSUN

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TA 2025

PEMBINA	:	Luky Alfirman	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
PENGARAH	:	1. Ludiro 2. Sandy Firdaus 3. Purwanto 4. Jaka Sucipta 5. Lydia Kurniawati Christyana 6. Adriyanto 7. Agung Widiadi	Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Dana Transfer Umum Direktur Dana Transfer Khusus Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
KETUA	:	Iwan Richard Butarbutar	Ketua Tim Reguler Penyaluran Dana Transfer
ANGGOTA	:	Kindy Rinaldy Syahrir, Mauliate Harnalyes Silitonga, Yuni Ariani, Bondan Widyatmoko, Aan Prianto, Ricka Yunita Prasetya, Tatang, Endah Pusparini, Rini Anjar Sari, Rahmatullah Priyo Kusuma, Ryan Andhika Wahyu Putra, Honiar Arfianto	
KONTRIBUTOR DATA	:	1. Tim Reguler Dana Alokasi Umum 2. Tim Reguler Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 3. Tim Reguler Dana Bagi Hasil Non Sumber Daya Alam 4. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Umum 5. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pengembangan Manusia dan Kebudayaan 6. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman 7. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik 8. Tim Reguler Hibah Daerah 9. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Khusus 10. Tim Reguler Pengelolaan Dana Desa 11. Tim Reguler Dana Otonomi Khusus 12. Tim Reguler Insentif Fiskal dan Keistimewaan 13. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN



TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan

Gedung Radius Prawiro, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1
Jakarta-10710





2025

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025



**Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Radius Prawiro, Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta – 10710

www.djpk.kemenkeu.go.id

